

PERAN PENGAWASAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI LAPORAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA YOGYAKARTA

Oleh : Kaniadyah Rachmawati¹, Dwi Haryati²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan oleh Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan laporan maladministrasi pelayanan publik di RSUD Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, menganalisis kendala yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengetahui upaya Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kendala yang timbul dalam penanganan laporan maladministrasi di RSUD Kota Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian kepustakaan dan lapangan kemudian dianalisis dan diolah secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **Pertama**, peran pengawasan Ombudsman RI Perwakilan D.I Yogyakarta dalam menindaklanjuti laporan maladministrasi di RSUD Kota Yogyakarta menghasilkan rekomendasi yang berhasil dilaksanakan pada temuan kasus pertama. Dalam kasus kedua dan ketiga, ORI DIY tidak dapat berperan dengan maksimal dikarenakan Pelapor yang tidak memenuhi persyaratan administratif. **Kedua**, dalam proses menindaklanjuti laporan maladministrasi, Ombudsman RI Perwakilan D.I Yogyakarta menemukan kendala pada saat menangani laporan maladministrasi yang terjadi di RSUD Kota Yogyakarta yaitu proses penyelesaian yang lama, sumber daya manusia yang terbatas, dan terbatasnya anggaran Ombudsman. **Ketiga**, upaya yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan D.I Yogyakarta dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi adalah dengan menerapkan peraturan tentang jangka waktu penyelesaian laporan, menambah keasistenan di Ombudsman perwakilan, relokasi anggaran, dan memaksimalkan sosialisasi melalui kanal *digital*.

Kata kunci: Pengawasan, Ombudsman, Maladministrasi, Rumah Sakit.

¹ Mahasiswa Starta-1 (S-1) pada Departemen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Pengajar Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

***THE SUPERVISORY ROLE OF OMBUDSMAN REPUBLIC
INDONESIA REPRESENTATIVE D.I YOGYAKARTA IN HANDLING
REPORTS OF MALADMINISTRATION OF PUBLIC SERVICES AT
YOGYAKARTA REGIONAL PUBLIC HOSPITAL***

Authors : Kaniadyah Rachmawati³, Dwi Haryati⁴

ABSTRACT

This study aims to analyze the supervisory role of Ombudsman of the Republic of Indonesia for the Special Region of Yogyakarta in completing reports of maladministration of public services at the Yogyakarta Regional Public Hospital, to analyze the obstacles faced by the Ombudsman of the Republic of Indonesia for the Special Region of Yogyakarta, and to find out the efforts of the Ombudsman of the Republic of Indonesia for the Special Region of Yogyakarta in dealing with obstacles that arise in the handling of reports of maladministration at the Yogyakarta Regional Public Hospital.

The research method used in writing this law is empirical normative with a descriptive nature. This research was conducted by library research to obtain secondary data and field research to obtain primary data. The results of library and field research were then analyzed and processed qualitatively.

The results of this study indicate that First, the supervisory role of the Indonesian Ombudsman Representative of D.I Yogyakarta in following up on maladministration reports at the Yogyakarta Regional Public Hospital resulted in recommendations that were successfully implemented in the first case findings. In the second and third cases, ORI DIY could not play its role optimally because the reporter did not meet the administrative requirements. Second, in the process of following up on maladministration reports, the Indonesian Ombudsman Representative D.I Yogyakarta found obstacles when handling reports of maladministration that occurred at the Yogyakarta Regional Public Hospital, namely the long completion process, limited human resources, and the limited Ombudsman budget. Third, the efforts made by the Indonesian Ombudsman Representative D.I Yogyakarta in overcoming the obstacles that occur are by implementing regulations regarding the time frame for completing reports, adding assistantship at the representative Ombudsman, budget relocation, and maximizing socialization through digital channels.

Keywords: Supervision, Ombudsman, Maladministration, Hospital

³ Undergraduate Student of Administration State Law Departement at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

⁴ Lecturer of Administrative State Law Departemen at Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta